

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum BKPP Kota Semarang

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) di Kota Semarang adalah salah satu lembaga daerah yang memiliki keunggulan dalam mengelola sumber daya manusia aparat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Lembaga ini mengemban tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan lokal mengenai kepegawaian, peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), pendidikan dan pelatihan, serta pengawasan kesejahteraan dan disiplin pegawai. Keberadaan BKPP menjadi faktor yang krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang tepat, efisien, dan mengikuti sistem merit, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Di samping kantor pusat, BKPP juga memiliki unit pelaksana teknis yang dikenal sebagai Balai Diklat BKPP Kota Semarang, yang berlokasi di Jl. Fatmawati No. 73A, Semarang. Balai ini berperan sebagai tempat untuk mengadakan pelatihan, workshop, dan peningkatan kompetensi ASN yang berada di dalam Pemerintah Kota Semarang. Keberadaan Balai Diklat menjadi fasilitas yang signifikan dalam mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional, berintegritas, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, BKPP Kota Semarang secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan seperti pengumuman pengadaan ASN dan PPPK, penyelenggaraan seleksi kompetensi, penetapan kebutuhan dan alokasi pegawai, kenaikan pangkat, serta pengembangan karir pegawai. Informasi mengenai kegiatan ini disebarkan secara terbuka melalui situs resmi BKPP Kota Semarang,

yang mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Melalui fungsi-fungsi tersebut, BKPP berusaha untuk membangun birokrasi yang profesional, netral, dan berfokus pada pelayanan publik. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk peningkatan kompetensi ASN dalam era digital, penyesuaian struktur organisasi dengan perubahan kebijakan nasional, dan optimalisasi sistem informasi kepegawaian daerah. Oleh sebab itu, BKPP terus meningkatkan program pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi, memperkuat sistem merit dalam proses rekrutmen dan promosi, serta menciptakan budaya kerja yang fleksibel terhadap kemajuan zaman.

BKPP Kota Semarang berperan sebagai salah satu lembaga penting dalam mendukung pencapaian visi Pemerintah Kota Semarang, yaitu *"Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat untuk Indonesia Maju"*, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi.

2.1.1 Kondisi Geografis BKPP Kota Semarang

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang berlokasi di kompleks Balaikota Semarang, persisnya di Jl. Pemuda No. 148, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dari segi geografi, tempat ini berada di jantung aktivitas pemerintahan Kota Semarang dengan koordinat kira-kira 6°58'27.0" Lintang Selatan dan 110°25'29.0" Bujur Timur.

Posisi BKPP sangat strategis karena berada di tengah pusat pemerintahan, area perkantoran, dan lokasi perdagangan. Gedung BKPP menempati lantai lima Gedung Much Ichsan, yang juga berfungsi sebagai pusat berbagai aktivitas dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang. Di sekelilingnya, ada beberapa lembaga penting seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kota Semarang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Penataan Ruang, BPKAD, serta LPSE Kota Semarang.

Dari sudut pandang topografi, kawasan Balaikota Semarang terletak di daerah yang datar dengan elevasi rata-rata sekitar 3–5 meter di atas permukaan laut (mdpl). Keadaan ini menjadikan wilayah ini relatif mudah diakses dan menjadi pusat mobilitas bagi pegawai pemerintah serta masyarakat umum. Dari perspektif akses, lokasi BKPP memiliki jaringan transportasi yang memadai, karena berada di jalur utama kota (Jl. Pemuda) yang terhubung langsung dengan Jl. Pandanaran, Jl. Imam Bonjol, dan Jl. Ahmad Yani, serta dekat dengan fasilitas umum seperti Stasiun Semarang Tawang, Simpang Lima, dan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani.



Gambar 2. 1 Peta Lokasi BKPP Kota Semarang

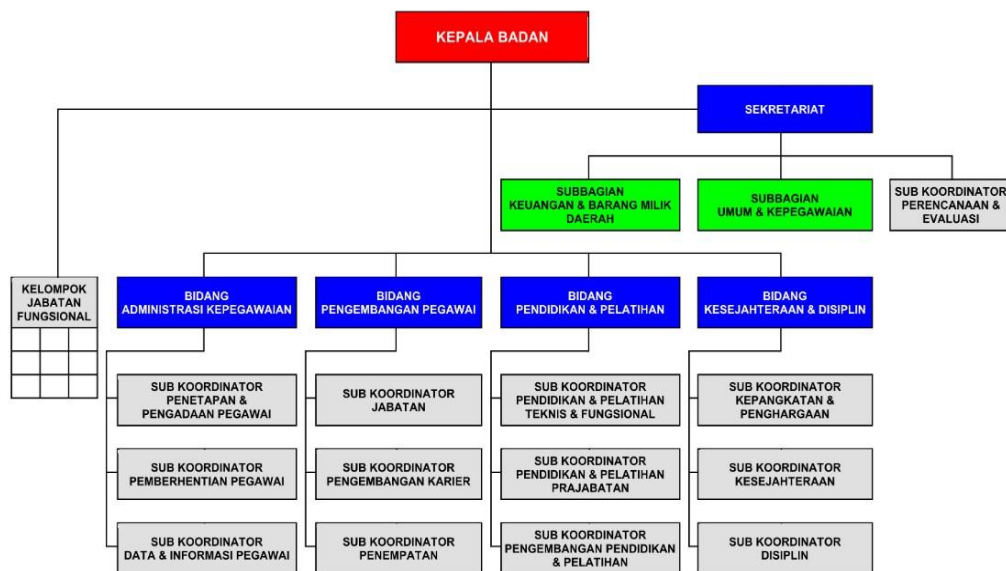
Sumber: Google Maps (2025)

Letak yang strategis di pusat pemerintahan Kota Semarang menjadikan BKPP mudah dijangkau oleh berbagai pihak. Posisi ini memudahkan koordinasi

antarinstansi, serta memperlancar proses pelayanan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

2.1.2 Struktur Organisasi BKPP Kota Semarang

Berikut merupakan struktur organisasi yang ada di BKPP Kota Semarang:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BKPP Kota Semarang

Sumber : (BKPP Kota Semarang, 2024)

Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang terdiri dari beberapa bagian utama yang saling berkoordinasi dalam mengelola administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta kesejahteraan dan disiplin pegawai.

Di puncak struktur terdapat Kepala Badan, yang membawahi Sekretariat serta beberapa bidang utama. Sekretariat terdiri dari dua subbagian, yaitu Subbagian Keuangan & Barang Milik Daerah serta Subbagian Umum & Kepegawaian, yang bertanggung jawab atas administrasi keuangan dan

kepegawaian. Selain itu, terdapat Sub Koordinator Perencanaan & Evaluasi, yang berperan dalam perencanaan strategis dan evaluasi program kerja BKPP.

BKPP juga memiliki empat bidang utama. Bidang Administrasi Kepegawaian bertugas mengelola proses penetapan, pengadaan, pemberhentian, serta data dan informasi pegawai. Dalam bidang ini terdapat tiga sub koordinator, yaitu Sub Koordinator Penetapan & Pengadaan Pegawai, Sub Koordinator Pemberhentian Pegawai, dan Sub Koordinator Data & Informasi Pegawai.

Selanjutnya, Bidang Pengembangan Pegawai berfokus pada pengelolaan jabatan, pengembangan karier, dan penempatan pegawai. Bidang ini memiliki tiga sub koordinator, yaitu Sub Koordinator Jabatan, Sub Koordinator Pengembangan Karier, dan Sub Koordinator Penempatan.

Bidang Pendidikan & Pelatihan bertanggung jawab atas pengelolaan pelatihan teknis, fungsional, serta pendidikan prajabatan dan pengembangan pendidikan pegawai. Terdapat tiga sub koordinator dalam bidang ini, yaitu Sub Koordinator Pendidikan & Pelatihan Teknis & Fungsional, Sub Koordinator Pendidikan & Pelatihan Prajabatan, dan Sub Koordinator Pengembangan Pendidikan & Pelatihan.

Terakhir, Bidang Kesejahteraan & Disiplin bertugas menangani kesejahteraan, penghargaan, kepangkatan, serta disiplin pegawai. Bidang ini memiliki tiga sub koordinator, yaitu Sub Koordinator Kepangkatan & Penghargaan, Sub Koordinator Kesejahteraan, dan Sub Koordinator Disiplin.

Terdapat juga Kelompok Jabatan Fungsional, yang berisi tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian tertentu. Secara keseluruhan, struktur organisasi BKPP Kota Semarang dirancang untuk memastikan pengelolaan kepegawaian yang efisien, transparan, dan profesional dalam mendukung kinerja aparatur pemerintahan di Kota Semarang.

2.1.3 Visi dan Misi BKPP Kota Semarang

Sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian dan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), BKPP Kota Semarang menetapkan visi serta misi sebagai arah pembangunan kelembagaan. Rumusan visi dan misi tersebut menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan berbagai program strategis, termasuk pengembangan kapasitas (*capacity building*) yang bertujuan memperkuat profesionalisme aparatur di seluruh lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Visi BKPP Kota Semarang

“Mewujudkan ASN yang unggul, berkompeten, dan berintegritas sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang semakin maju.”

Misi BKPP Kota Semarang

Untuk merealisasikan visi tersebut, BKPP menetapkan beberapa misi pokok sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pengelolaan kepegawaian melalui penerapan sistem merit, sehingga setiap proses pengadaan, rotasi, dan pengembangan pegawai berlangsung secara objektif dan sesuai kompetensi jabatan.
2. Mendorong peningkatan kapasitas ASN melalui program pendidikan, pelatihan, dan kegiatan pengembangan lainnya yang dirancang berkelanjutan serta relevan dengan kebutuhan organisasi.
3. Menghadirkan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, dan bertanggung jawab, dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan.
4. Memperkuat disiplin kerja, etika profesi, dan integritas ASN, melalui pembinaan kinerja dan evaluasi rutin yang terukur.

5. Mengembangkan tata kelola internal BKPP agar semakin efektif, sehingga mampu memberikan dukungan optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Pemerintah Kota Semarang.

2.1.4 Kondisi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia BKPP Kota Semarang

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Semarang adalah unit organisasi yang memiliki peranan sangat penting dalam mengelola administrasi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Menurut Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 mengenai Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja BKPP, lembaga ini berada dalam posisi sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepegawaian, pendidikan, serta pelatihan, yang beroperasi di bawah pengawasan langsung Wali Kota Semarang melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hal sumber daya manusia, BKPP Semarang dilengkapi oleh pegawai dengan berbagai kompetensi, baik dalam pendidikan, pengalaman, maupun keahlian teknis. Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPP Tahun 2024, terdapat 86 ASN yang bekerja di lingkungan BKPP, di mana 65 di antaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari keseluruhan pegawai tersebut, 58% memiliki gelar S1, 32% memiliki gelar S2, dan 10% sisanya berpendidikan D3 atau setara.

Struktur jabatan di BKPP Semarang mencakup pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf pelaksana administrasi. Pejabat struktural biasanya menduduki posisi kepala bidang dan subkoordinator, sedangkan pejabat fungsional mencakup widyaiswara, analis kepegawaian, serta perencana. Di sisi lain, staf pelaksana memberikan dukungan dalam berbagai kegiatan teknis dan operasional di masing-masing bidang.

Dari segi pengalaman kerja, mayoritas ASN di BKPP memiliki lebih dari satu dekade pengalaman, terutama di bidang pengembangan pegawai dan pelatihan pendidikan. Ini mencerminkan tingkat profesionalisme dan pengalaman yang cukup dalam pengelolaan sumber daya aparatur. Selain itu, BKPP secara rutin menyelenggarakan pelatihan internal untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial para pegawainya, selaras dengan kebijakan pengembangan kapasitas aparatur daerah.

BKPP Semarang memainkan peran vital dalam memastikan pengelolaan ASN yang profesional, transparan, dan berdasarkan pada meritokrasi. Kelembagaan yang kuat serta kualitas SDM yang baik menjadi unsur utama yang mendukung keberhasilan BKPP dalam menjalankan tugas-tugas pembinaan, pendidikan, dan pengembangan karir bagi aparatur di Pemerintah Kota Semarang.

2.1.5 Profil Pelatihan dan Program *Capacity Building* di BKPP Kota Semarang

BKPP Kota Semarang merupakan perangkat daerah yang memiliki mandat pengelolaan kepegawaian sekaligus peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai institusi yang menangani urusan pembinaan kompetensi, BKPP berperan menyelenggarakan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir untuk mendukung kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Sianjar Pemkot Semarang, 2024).

Pada Rencana Kerja (Renja) BKPP Tahun 2024, program pengembangan kompetensi masuk dalam tiga kategori besar, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Kepegawaian Daerah, dan Program Pendidikan dan Pelatihan. Program-program tersebut menjadi dasar pelaksanaan berbagai agenda capacity building sepanjang tahun anggaran (BKPP Kota Semarang, 2024).

Jenis pelatihan yang diselenggarakan meliputi: pelatihan teknis, diklat fungsional, pelatihan manajerial, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA),

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), serta Pendidikan Dasar (Diklat Prajabatan) bagi CPNS. Pelaksanaan kegiatan menggunakan model *blended learning* (tatap muka dan LMS) yang sejalan dengan kebijakan pelatihan ASN di Jawa Tengah (BPSDMD Jateng, 2024).

Peserta pelatihan merupakan ASN dari berbagai golongan, termasuk PNS, PPPK, pejabat struktural/fungsional, serta CPNS yang telah dinyatakan lulus dan akan ditempatkan pada OPD. Pada 2024, misalnya, BKPP mengumumkan penempatan 301 CPNS sebelum mengikuti sejumlah pelatihan wajib (Antara News Jateng, 2024).

Selain pelatihan, BKPP juga meluncurkan inovasi digital seperti program AUTO SIMPATIK, yaitu sistem otomatisasi dan simplifikasi layanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas pelayanan ASN di Kota Semarang (SuaraBaru, 2025). Inovasi ini turut mendukung proses pembinaan ASN karena layanan yang terintegrasi memudahkan validasi data kompetensi dan riwayat pelatihan.

2.1.6 Latar Belakang Program Pelatihan

Pelatihan dan pengembangan keterampilan pegawai pemerintah memainkan peranan krusial di dalam reformasi birokrasi yang bertujuan meraih peningkatan profesionalisme, tanggung jawab, serta mutu layanan publik. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang memiliki Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang yang bertugas mengelola semua aspek manajemen sumber daya pegawai daerah. Tanggung jawab ini mencakup mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengelolaan karier, hingga pelaksanaan pelatihan serta peningkatan kapasitas.

BKPP Kota Semarang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah kendali Wali Kota Semarang, melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan lembaga ini dilandasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 yang

mengatur tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta cara kerja BKPP. Di dalam struktur organisasinya terdapat Kepala Badan, Sekretariat, empat bidang utama yaitu Administrasi Kepegawaian, Pengembangan Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan, serta Kesejahteraan dan Disiplin, ditambah dengan Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk mempertajam kegiatan belajar, BKPP juga memiliki Balai Diklat yang terletak di Jl. Fatmawati No. 73A, Kecamatan Tembalang, dilengkapi dengan ruangan kelas, sarana multimedia, tempat tinggal peserta, dan sistem e-learning berbasis LMS (BKPP Kota Semarang, 2024).

Sebagai lembaga yang fokus pada pengembangan SDM aparatur, BKPP melaksanakan program pelatihan *capacity building* yang bertujuan untuk memperkuat keterampilan pegawai dalam menanggapi perubahan layanan publik dan digitalisasi pemerintahan. Pendekatan *capacity building* ini dibangun di atas tiga pilar penting seperti, pengembangan sumber daya manusia, penguatan struktur organisasi, dan perbaikan sistem manajemen.

Implementasi pelatihan di BKPP tidak hanya berfokus pada peningkatan wawasan teknis ASN, tetapi juga berusaha untuk membangun karakter kerja yang menjunjung tinggi integritas, kerja sama, serta inovasi. Program ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan tahunan, agar materi dan metode pengajaran dapat disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi oleh organisasi.

Fokus utama dari kegiatan pelatihan *capacity building* ini adalah menciptakan ASN yang terampil, mampu beradaptasi, dan berintegritas, selaras dengan isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan garis besar kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021–2026 (BKPP Kota Semarang, 2024; Bappeda Kota Semarang, 2021)

